BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum Pidana di Indonesia

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara¹.

Menurut pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai Hukum Pidana, POMPE, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Sedangkan menurut pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Hukum Pidana, MOELJANTO mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk.

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

¹TeguhPrasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, (Jakarta : 2015)

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan².

a. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:³

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan).
- b. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan).

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan

²Yulies TienMasriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, (Jakarta : 2004).

³Yulies TienMasriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, (Jakarta : 2004), Hlm 61

strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur:⁴

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:⁵

1. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Prof.Mulyanto, S,H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang

⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, (Jakarta : 2015), Hlm 47

⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, (Jakarta : 2015), Hlm 48-50

dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata "perbuatan" tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Selain itu kata "perbuatan" lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjoono Prodjodikoro, S.H., dalam perundangna-undangan formal Indonesia, istilah "peristiwa pidana" pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah "peristiwa pidana" lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-herik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau

lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁶

- a. Unsur objektif
 - Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.
 - 1) Sifat melanggar hukum
 - 2) Kualitas dari pelaku
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - 3) Kausalitas

⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, (Jakarta : 2015), Hlm 50-51

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 4) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 208 KUHP.

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS,⁷ delik adalah *feity* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.

4. Bentuk-Bentuk Hukuman

⁷Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, (Jakarta : 2014)

Bentuk-bentuk hukuman terdapat dalam KUHP bab ke-2 yaitu Pasal 10. Bentuk-bentuk hukuman diuraikan sebagai berikut:⁸

1. Pidana pokok

a. Pidana mati

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi diskursus di masyarakat. Sebab hukuman merampas kehidupan seseorang padahal hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai konstitusi Negara.

b. Pidana penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu dengan menmpatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga permasyarakatan) dimana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum 15 tahun (pasal 12 ayat 2) KUHP, dan dapat melebihi batas maksimum yakni dalam hal yang di tentukan dalam pasal 12 (3) KUHP.

c. Pidana kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawa peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

⁸Lihat Pasal 10 KUHP

d. Pidana denda

Pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering di ancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat(1) KUHP adalah tiga puluh juta rupiah tujuh puluh lima sen. Apabila terpidana tidak membayarkan uang denda yang telah di putuskan maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat(2) KUHP sebagai pengganti pidana denda).

e. Hukuman tutupan

Dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pada pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir dibawah pidana denda. Tentulah pencantuman ini di dasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang di anutnya. Tetapi dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.

2. Pidana tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperbolehkan (Pasal 3 BW). Dalam pidana pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri.
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian.

b. Pidana perampasan barang tertentu

Hukuman tambahan kedua, menurut Pasal 39 KUHP berupa perampasan barang-barang milik terhukum dan tidak dikenakan untuk merampas semua barang milik terhukum.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim yaitu berupa barang-barang milik terhukum, meliputi:

1. Barang yang diperoleh dengan kejahatan.
2. Yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan untuk lebih jelasnya hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 39 KUHP.

c. Pidana pengumuman putusan hakim

Pidana putusan hakim hanya bisa dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

B. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cemar dapat diartikan sebagai kotor, ternoda, sedangkan pencemaran adalah hal mencemarkan, yaitu menjadikan “sesuatu” cemar, kotor, rusak dan lain-lain senada pula dengan kata polusi dan kontaminasi⁹.

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya¹⁰.

Akibat sampingan dari pengembangan teknologi adalah bahan pencemar yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini merupakan stimulus agar manusia menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tiap pencemaran mempunyai derajat pencemaran tahap pencemaran yang berbeda yang didasarkan pada¹¹.

- a. Konsentrasi zat pencemar.
- b. Waktu tercemarnya.
- c. Lamanya kontak antara bahan pencemar dengan lingkungan.

⁹Ebta Setiawan, <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/cemar.html>, 2012

¹⁰Gaffa Edila Putra, *Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Amdal*, Permata Press

¹¹Rachmat Hidayat S yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2014)

Menurut WHO, ditetapkan empat tahapan pencemaran:¹²

1. Pencemaran tingkat pertama

Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dari kadar zat pencemarannya maupun waktu kontak dengan lingkungan.

2. Pencemaran tingkat kedua

Pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada panca indera dan alat vegetative lainnya serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya.

3. Pencemaran tingkat tiga

Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis.

4. Pencemaran tingkat empat

Pencemaran yang menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam lingkungan karena kadar zat pencemar terlalu tinggi.

Pada saat ini pencemaran terhadap lingkungan berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Sekarang ini beban pencemaran dalam lingkungan sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat, pencemaran lingkungan dapat dikategorikan menjadi¹³.

¹²Rachmat Hidayat S yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2014), Hlm 25

¹³Rachmat Hidayat S yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang*

- a. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Akibat yang bisa ditimbulkan oleh pencemaran air ini, diantaranya dapat menyebabkan banjir, erosi, kekurangan sumber air bersih, dapat membuat sumber penyakit, tanah longsor, dapat merusak ekosistem sungai.
- b. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Belakangan ini tumbuh keprihatinan akan efek dari emisi polusi udara dalam konteks global dan hubungannya dengan pemanasan global (*global warming*) yang dipengaruhi oleh: Kegiatan manusia: transportasi, industri, pembangkit listrik, pembakaran (perapian, kompor, *furnace, incinerator*) dengan berbagai jenis bahan bakar, dan gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti (CFC).
- c. Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung di buang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*).

C. Pengertian Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan

fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum¹⁴.

Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Lingkungan hidup terdiri dari tatanan kesatuan dengan berbagai unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu maka pengelolaan lingkungan hidup memerlukan keterpaduan pelaksanaan di tingkat nasional, koordinasi pelaksanaan secara sektoral dan di daerah, sehingga semua ini terkait secara mantap dengan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, dengan kesatuan gerak dan langkah mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup¹⁵.

D. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung.

Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yakni: lingkungan dan hidup. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia lingkungan berarti adalah daerah, golongan, kalangan dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan

¹⁴Gaffa Edila Putra, *Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Amdal*, Permata Press, Hlm 3

¹⁵Rofiq Ahmad Soerjani dan Rozy Munir, *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Universitas Indonesia (UI-Press), (Jakarta : 1997)

hidup berarti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup berarti daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya.

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia di sekitar kita adalah pula bagian dari lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi sosial merupakan pula unsur lingkungan hidup kita

Lebih lanjut beberapa pendapat dari para ahli dan pakar lingkungan dalam mengemukakan tentang definisi lingkungan hidup antara lain:¹⁶

Munadjat Danusaputro mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Adapun Emil Salim menyatakan bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam

¹⁶A. Tersna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, (Jakarta : 2000)

ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Sejalan dengan pendapat Emil Salim tersebut, Otto Soemarwoto menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah sejumlah benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita.

Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan runag dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Selain pengertian lingkungan hidup sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para pakar tersebut, Faud Amsyari mengelompokkan lingkungan hidup atas tiga macam, yakni:¹⁷

1. Lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain yang semacamnya.
2. Lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lain.
3. Lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lain.

E. Sanksi Menurut Hukum Pidana

¹⁷Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik - delik di Luar KUHP*, Kencana, (Jakarta : 2016)

Hukuman ialah ancaman bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana¹⁸.

Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian menaati ketentuan.

Para sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana, yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Pidana adalah suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik, pidana ini bukan merupakan tujuan akhir melainkan tujuan terdekat, inilah perbedaan antara pidana dan tindakan, karena tindakan juga dapat berupa nestapa, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat¹⁹.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan diberikan dengan sengaja oleh badan yang

¹⁸ZaeniAsyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers*, (Jakarta 2016)

¹⁹ M. RazikIlham“*Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencurian Airan Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2017), Hlm 29

berwenang kepada seseorang yang cukup menurut hukum, yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau peristiwa pidana.

Kata sanksi dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah al-Uqubah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pembalasan dengan keburukan. Sedangkan Abdul Qodir Audah mendefinisikan sanksi (hukuman) adalah balasan yang ditentukan untuk kepentingan orang banyak atas perbuatan melanggar perintah Allah SWT.

Dari definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sanksi (hukuman) merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang menyebabkan orang lain menjadi korban atau menderita kerugian atas perbuatannya. Atau penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku tindak pidana sebagai balasan dari apa yang telah diperbuat kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.

Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman ialah pencegahan (*ar-rad'u waz-zarju*), pengajaran serta pendidikan (*al-islam wat-tahzib*). Adapun yang dimaksud pencegahan ialah mencegah diri si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang demikian. Dalam hukum Islam, penjatuhan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang dikuasai rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.

Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa golongan menurut segi tinjauannya:²⁰

1. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya, maka hukuman dapat dibagi menjadi empat:
 - a. Hukuman pokok (*al-Uqubah al-Asliyyah*), hukuman pokok yaitu hukuman yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana, seperti hukuman qisas bagi tindak pidana pembunuhan, hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana zina, dan hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian.
 - b. Hukuman pengganti (*al-Uqubah al-Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya alayan yang syar'i.
 - c. Hukuman tambahan (*al-Uqubah al-Tabaiyyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan sendiri.
 - d. Hukuman pelengkap (*al-Uqubah at-Taklimiyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan adanya putusan tersendiri san hakim.
2. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah hukuman, maka hukuman dapat dibagi dua:
 - a. Hukuman yang memiliki satu batas, artinya tidak memiliki batas tertinggi atau batas terendah. Hukuman ini

²⁰Muhammad Sakho Ahsin, *Ensikopedi Hukum Pidana Islam*, Karisma Ilmu, (Jakarta : 2007)

- tidak dapat dikurangi atau ditambah meskipun pada dasarnya bisa ditambah atau dikurangi.
- b. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kekuasaan untuk memilih hukuman sesuai antara kedua batas tersebut.
3. Berdasarkan kewajiaban menjatuhkan suatu hukuman, dalam hal ini ada dua macam hukuman yaitu:
 - a. Hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya, yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilihnya dari sekumpulan hukuman yang dianggap sesuai dengan keadaan tindak pidana serta pelaku.
 - b. Hukuman yang tidak ditentukan bentuk jumlahnya, yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilihnya dari sekumpulan hukuman yang dianggap sesuai dengan keadaan tindak pidana serta pelaku.
 4. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman, hukuman ini dibagi menjadi tiga, yaitu:²¹
 - a. Hukuman badan (*Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan si pelaku seperti hukuman mati, dera, dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa (*Uqubah Nafsiyyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jiwa si pelaku, contohnya hukumannasihat, celaan, dan ancaman.

²¹Muhammad Sakho Ahsin, *Ensikopedi Hukum Pidana Islam*, Karisma Ilmu, (Jakarta : 2007, Hlm 40

- c. Hukuman harta (*Uqubah Maliyyah*), yaitu hukuman yang ditimpahkan pada harta pelaku, seperti hukuman diyat, denda dan biaya administrasi.
5. Berdasarkan macamnya tindak pidana yang diancamkan hukuman, adapun rincian hukuman tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Hukuman yang telah ditetapkan terhadap tindak pidana hudud. Hukuman hudud terbagi menjadi tujuh macam, sesuai dengan bilangan tindak pidana hudud, yaitu:
 - 1) Zina.
 - 2) Qazaf
 - 3) Meminum-minuman keras.
 - 4) Mencuri.
 - 5) Melakukan hirabah (gangguan keamanan).
 - 6) Murtad.
 - 7) Memberontak.

F. Pengertian Fiqh Jinayah

Dalam hukum Islam, istilah hukum pidana disebut dengan *fiqh jinayah*. *Jinayah* berarti “perbuatan yang dilarang syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya”. Pengertian lain yang lebih operasional adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban),

sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw²².

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa, *fiqh jinayah* adalah ilmu yang membicarakan tentang jenis-jenis hukuman yang diperintah dan dilarang al-Quran dan hadis Nabi Saw, serta hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar baik perintah maupun larangan tersebut (tindakan kriminal). Yang dimaksud tindakan kriminal adalah perbuatan kehatan yang mengganggu ketertiban umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan.

Pengertian tersebut sejalan dengan perspektif hukum konvensional tentang hukum pidana, yakni hukum mengenai delik yang diancam hukuman pidana atau dengan kata lain serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya. Ada dua kata yang sama-sama memiliki pengertian melawan hukum dalam pengertian tersebut, yakni kata “delik” dan “tindak pidana”. Delik dalam bahasa latinya *delictum* berarti tindak pidana atau sering juga dipergunakan istilah lainnya yaitu *strafbaar feit* yang merupakan istilah dalam hukum pidana Belanda.

Fiqh jinayah adalah hukum Islam yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya, membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Dalam *fiqh jinayah* dibicarakan pula

²²Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana, (Jakarta : 2013)

upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang teori-teori tentang hukuman²³.

Di dalam hukum pidana Islam juga dikenal istilah *jinayah* (hukum kepidanaan) atau disebut juga dengan *jarimah* (perbuatan tindak pidana). Meskipun kedua istilah tersebut sama, tetapi kebanyakan fuqaha memakai kata *jinayah* untuk perbuatan yang terkait dengan jiwa, seperti membunuh, melukai, memukul, dan mengugurkan kandungan. Sedangkan kata *jarimah* dipergunakan untuk menyebut selain pelanggaran terhadap jiwa. Sebenarnya, baik kata *delictum* dan *strafbaar feit* maupun *jinayah* dan *jarimah* memiliki benang merah yang kuat, yakni bermakna tindak kejahatan. *Jarimah* terbagi atas:²⁴

1. *Jarimah Qishash*

Adapun arti *qishash* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

²³A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Kencana, (Jakarta : 2006)

²⁴M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, AMZAH, (Jakarta : 2016)

Dalam fiqh jinayah, sanksi *qishash* ada dua macam, yaitu sebagai berikut.²⁵

1. *Qishash* karena melakukan jarimah pembunuhan.
2. *Qishash* karena melakukan jarimah penganiayaan.

Hukuman *qishash* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qishash* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diyat.

Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qishash*. Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan ini. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut.²⁶

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan semi sengaja
3. pembunuhan tersalah.

Ketiga macam pembunuhan di atas disepakati oleh jumhur ulama, kecuali Imam Malik. Mengenai hal ini, Abdul Qadir Audah mengatakan, perbedaan pendapat mendasar bahwa Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan semi sengaja karena menurutnya di dalam Al-qur'an hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan

²⁵M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, AMZAH, (Jakarta : 2016), Hlm 5

²⁶M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, AMZAH, (Jakarta : 2016), Hlm 6

tersalah. Barang siapa menambah satu macam lagi, berarti ia menambah nash.

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *qishash* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. Nash yang mewajibkan hukuman *qishash* ini tidak hanya berdasarkan Al-qur'an, tetapi juga hadis Nabi dan tindakan para sahabat.

Pendapat di atas mewajibkan hukuman *qishash* terhadap pelaku jarimah pembunuhan secara sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi hukuman berupa diyat.

Sementara itu mengenai pembunuhan semi sengaja dan tersalah, sanksi hukumnya berupa diyat *mukhaffah* (diyat ringan), bukan diyat *mughallazah* (diyat berat). Sebab, diyat *mughallazah* diberlakukan pada pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban.

2. *Jarimah Hudud*

Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi *had* (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah). Hukumannya berupa rajam, jilid dan reda, pototng tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib.

Menurut fuqaha *hudud* adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara benar karena Allah. Sanksi hukum ini disebut dengan *had* karena dapat mencegah pelaku dari kegiatan dosanya yang telah rutin. Batas yang dapat membedakan benda-

benda tidak bergerak dari benda-benda lain yang juga tidak bergerak seperti dinding dan tanah-tanah.

Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis *hudud*, yaitu sebagai berikut.²⁷

1. *Hudud* yang termasuk hak Allah.
2. *Hudud* yang termasuk hak manusia.

Menurut Abu Ya'la, *hudud* jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun *hudud* dalam kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar.

Kemudian jika ditinjau dari segi materi *jarimah*, *hudud* terbagi menjadi tujuh, yaitu *hudud* atas *jarimah* zina, qadzf, meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.

3. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir (Pengasingan) Adalah semua jenis perbuatan pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-qur'an atau hadis. Aturan bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan *had*.

²⁷M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, AMZAH, (Jakarta : 2016), hlm 16-17

Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

a. Hukuman mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zir* bertujuan memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu boleh dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum mengendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fuqoha' yang lain dalam *jarimah ta'zir* tidak ada hukuman mati. Di luar *ta'zir* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti zina, gangguan keamanan, *riddah* (murtad, keluar dari Islam), pemberontakan dan pembunuhan sengaja.

b. Hukuman dera (jilid)

Jilid adalah hukuman dengan memukul terhukum menggunakan cambuk atau alat lainnya yang sejenis. Jilid merupakan salah satu dari sanksi bagi pelaku tindak pidana hudud. Namun demikian, *ta'zir* juga mengenal hukuman jilid. Seorang hakim diperbolehkan memberikan sanksi pemukulan dengan cambuk, tongkat, batang dahan, atau alat lain yang sejenis.

Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

Sedangkan dikalangan Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat yang ketiga, hukuman cambuk pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat lain bahwa *jarimah ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud*.

c. Hukuman pengasingan

Pengasingan adalah membuang seseorang di tempat yang jauh, pengasingan sebagai hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan kepada pezina *ghairu muhshan* setelah sebelumnya ia dijatuhi *had zina*.

Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad tidak boleh lebih dari satu tahun, menurut Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman disini adalah hukuman *ta'zir*.

d. Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam

syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja.

Dalam syariat Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman jilid. Karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah si pelaku menjadi lebih baik. Dengan demikian, apabila dengan pemenjaraan, tujuan tersebut tidak tercapai, hukumannya harus diganti dengan yang lainnya yaitu hukuman jilid. Hukuman penjara dibagi menjadi dua jenis yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas yaitu hukuman yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum, sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah dapat berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau sampai si pelaku bertaubat seperti pembunuhan, pembunuh yang terlepas dari *qishash* karena suatu hal-hal yang meragukan, homoseksual, pencurian. Jadi pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi tindak kriminal yang berat-berat saja.

e. Hukuman salib

Untuk hukuman *ta'zir*, hukuman salib sudah pasti tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang wudhu untuk mengerjakan shalat, tetapi terhukum shalat dengan cara isyarat.

f. Hukuman *Ghuramah* (ganti rugi)

Ganti rugi adalah hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya, hukumannya didenda dengan dua kali lipat harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

g. Hukuman peringatan atau ancaman

Peringatan juga merupakan hukuman dalam Islam. Bahkan dalam berbagai bidang, seseorang menerima ancaman sebagai bagian dari sanksi. Dalam hal ini hukum cukup memanggil si pelaku dan menerangkan perbuatannya salah serta menasehatinya agar tidak melakukan kemudian hari. Sanksi peringatan merupakan sanksi ancang-ancang bahwa dia akan menerima hukuman dalam bentuk lain apabila melakukan perbuatan yang sama atau lebih dari itu di kemudian hari.

Selain itu, dalam hukum pidana Islam juga dikenakan delik *qishas* (memotong atau membalas). Selain itu juga ada delik *diat* (denda dalam bentuk denda atau harta) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Perbedaannya, *qishas* diberlakukan bagi perbuatan pidana yang sengaja, sedangkan *diat* diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak disengaja. Ibnu Rusyid mengelompokkan *qishas*.

h. Sanksi-sanksi lain

Sanksi-sanksi yang disebutkan di atas itu pada umumnya dapat dijatuhkan terhadap setiap *jarimah* atas dasar pertimbangan hakim. Terhadap sanksi-sanksi lain yang bersifat khusus, sanksi-sanksi tersebut dapat berupa penurunan jabatan atau pemecatan dari pekerjaan, pemusnahan atau penganghancuran barang-barang tertentu.

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Hukuman dibagi atas dua macam:²⁸

1. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, yaitu hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi seperti, hukuman yang termasuk kedalam kelompok *jarimah hudud* dan *jarimah qishash* atau *diyat*.
2. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan hakim ini, hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zir*. Hakim dapat memilih apakah si terhukum akan dipenjarakan atau didera (jilid), mengenai penjara pun hakim dapat memilih berapa lama si pelaku dipenjarakan.

²⁸ Maliki Abdurrahman, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah (Bogor : 2002)

G. Tujuan Hukum Pidana Islam

Berbeda dengan sistem di mana pun, sistem hukum Islam (termasuk di dalamnya adalah hukum pidana Islam) merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya seorang yang beragama Islam, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum Islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan penegakan sistem hukum Islam yang paling utama adalah memenuhi perintah Allah sebagai bagian dari konsekuensi keimanan seorang muslim.

Dalam kajian hukum Islam, tujuan hukum disebut dengan *maqasid al-syari'ah*. Yakni maksud atau tujuan disyariatkannya hukum untuk melindungi kebutuhan hidup manusia, dengan bahasa lain disebut *hikmat* dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Dalam tahap realisasinya, al-Syatibi menunjukkan *maqasid al-syari'ah* kepada lima bidang

Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

1. *Hafidz al din* (memelihara agama). Dalam hukum Islam dikenal *Fiqh* ibadah, yang berisi aturan hubungan manusia dengan Tuhan dan kewajiban berjihad mempertahankan agama.
2. *Hafidz al nafs* (memelihara jiwa). Tujuan ini tampak dalam seperangkat aturan Illahi dalam bidang hukum pidana (*Fiqh Jinayah*)

²⁹ Gibtiah, *Kejahatan Tindak Pidana Pembegalan: Analisis Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Jinayah*, 2016, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, (Palembang : 2016).

3. *Hafidz al mal* (memelihara harta), prinsip dalam hukum Islam ialah segala yang di langit dan di bumi adalah milik Allah dan manusia hanya memiliki hak relatif sehingga dalam hak yang dimiliki manusia terdapat hak orang lain seperti ketentuan zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu. Perkembangan lain dalam era ekonomi baru ini ialah dalam bidang hukum ekonomi Islam yang bersaing keras perkembangannya dengan isu jihad yang terkadang dipolitis
4. *Hafizh al 'irdl* (memelihara keturunan dan kehormatan). Aturan yang bertujuan memelihara keturunan dan kehormatan ialah antara lain dalam hukum perkawinan dan kewarisan dengan segala aspeknya.
5. *Hafidz al'aql* (memelihara akal). Aturan yang tampak jelas pada beberapa hukum khamar (larangan minuman keras)

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa tujuan hukum Islam termasuk juga hukum pidana, tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan Negara, bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan yang berhubungan dengan keyakinan agama, baik menyangkut jiwa, akal atau potensi berpikir, keturunan, maupun harta keayaan. Jadi wilayah yang menjadi tujuan perlindungan dari hukum pidana Islam ini jelas luas sekali karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, kaitannya dengan sesama manusia maupun dengan Sang Pencipta.